**\TUJUAN PEMBELAJARAN:**

Modul ini memiliki tujuan untuk membahas tentang Analisis Kebijakan Publik, memahami peran dan pengaruh kebijakan publik dalam pembangunan serta tujuan penghidupan berkelanjutan. Pembahasan modul ini memiliki beberapa tujuan pembelajaran yaitu:

1. Mengenal kebijakan publik.
2. Memahami pengaruh kebijakan publik terhadap kehidupan masyarakat.
3. Memahami hubungan antara kebijakan publik dengan komponen kerangka kerja *(study learning)* SL lainnya.
4. Menggali isu-isu penting yang berkaitan dengan kebijakan publik bagi pencapaian tujuan penghidupan masyarakat.
5. Menganalisis peranan kebijakan publik dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.

**TAHAPAN PEMBELAJARAN:’**

**Diskusi :** Kita akan mendiskusikan bersama beberapa kasus seperti penetapan Ranperda tentang Rokok dan contoh-contoh lainya serta kebijakan publik lainnya.

**Paparan :** Fasilitator memberikan penjelasan singkat tentang memahami dan menganalisa kebijakan publik

**Praktik Analisa :** Selanjutnya dilakukan analisa kasus kebijakan publik/program pembangunan dalam kaitannya dengan peranan kebijakan publik dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

**Rangkuman :** Pada tahap akhir kita akan dapat menemukan pembelajaran *(lesson learn)* dari pembahasan diskusi yang telah dilakukan bersama tentang analisa kebijakan publik.

|  |
| --- |
| DISKUSI |
| POLUSI DAN KEMACETAN LALU LINTASSetelah mengikuti penayangan beberapa dampak polusi dan kemacetan lalu lintas, diskusikan secara bersama-sama pertanyaan berikut ini:1. Menurut anda apa peran penting pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
2. Apa dampak yang dirasakan masyarakat atas kasus tersebut.
3. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemerintah untuk mengatasi masalah dimaksud.
 |

**Bagian I**

**MENGENAL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.**

Apakah Kebijakan Publik ?

Umumnya kota-kota besar di Indonesia menghadapi permasalahan pokok terutama dalam bidang, tingginya tingkat polusi udara dan kemacetan lalu lintas. Warga yang mengendarai kenderaan menuju tempat pekerjaannya dan sebaliknya pulang ke rumah, dihadapkan kepada persoalan kemacetan lalu lintas. Disamping persoalan lalu lintas juga dibarengi dengan polusi udara yang berasal dari knalpot kenderaan pengguna jalan. Persolan kemacetan dan polusi udara tentu bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja, melainkan diakibatkan oleh apa yang sering kita sebut dengan “Kebijakan Publik”. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, menekankan pembangaunan jalan-jalan besar, membantu menekan rendah harga BBM, namun pada sisi yang lain juga nampak kurangnya perhatian terhadap system pengangkutan umum. Apakah kebijakan-kebijakan lain telah menghasilkan system transportasi yang lebih memuaskan masih terbuka untuk diperdebatkan, namun demikian yang menjadi persoalan pokoknya adalah kemacetan lalu lintas dan polusi udara di beberapa kota besar hingga kini bukanlah yang terjadi secara alamiah, tetapi kebijakan publik telah menyebabkan banyak hal yang membentuk situasi perkotaan seperti yang terjadi sekarang ini.

Terdapat beberapa jenis proses yang berlangsung pada berbagai tingkatan masyarakat antara lain:

1. **Kebijakan *(policy)***

Kebijakan mendorong perubahan dan penyusunan peraturan-peraturan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan memberikan arah, pengetahuan, pendistribusian berbagai sumber daya dan kepentingan dalam masyarakat. Apabila dilihat dari sifat dan ruang lingkupnya terdapat beberapa pembagian kebijakan yaitu: 1) Makro yaitu, kebijakan yang berlaku umum pada tingkat yang lebih luas, baik nasional maupun internasional, 2) Sektoral yaitu, kebijakan terkait dengan peran-peran pemerintah dan pihak swasta pada sektor-sektor tertenntu, 3) Pendistribusian yaitu, kebijakan umum mengenai pendistribusian kembali dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya masalah pajak dan kewajiban Negara terhadap warga Negara, pelayanan dan jaminan sosial, 4) Pengaturan yaitu, kebijakan umum yang mengatur berbagai bentuk praktek pembangunan, usaha dan kegiatan-kegiatan masyarakat lain yang bersifat progresif.

1. **Perundang-Undangan *(legislation)***

Prundang-undangan meliputi produk legislative berupa Undang-Undang dan peraturan-peraturan serta perjanjian yang memiliki kekuatan hokum yang mengikat, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara pemerintah dengan swasta dalam taraf nasional dan internasional. Apabila dilihat dari bentuk dan ruang lingkup penerapannya terdapat beberapa contoh perundang-undangan *legislation* antara lain: 1) Perjanjian internasional (*international agreements),* kesepakatan internasional dalam bidang-bidang tertentu, baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral yang mengikat Negara-negara yang menandatanganinya, 2) Peraturan perundang-undangan dalam negeri, di Indonesia dikenal beberapa jenis undang-undang dan peraturan (UU, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen dan lain-lain).

1. **Pranata *(institution)***

Kelembagaan dalam hal ini diartikan secara umum sebagai aturan main *rule of the game,* yang terbentuk dari rutinitas yang telah dianggap baku. Kelembagaan bersifat informal, memgatur hubungan di dalamsuatu struktur ataupun antar struktur. Hal ini membantu kita dalam memahami beberapa bentyk kelembagaan yang berkembang, diantaranya:

1. Pasar *(market),* yaitu sedjumlah aturan main yang mengatur pola hubungan tertentu antara permintaan dan ketersediaan barang atau jasa, pasar sering kali menjadi factor penentu yang meskipun dapat diprediksi, namun memiliki perilaku tersendiri.
2. Aturan main tentang akses terhadap sumberdaya, misalnya bagaimana pemanfaatan hutan atau tanah desa diatur atau pengaturan irigasi yang berkembang dalam masyarakat.
3. Aturan main tertentu yang berkembang dalam organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Umumnya setiap organisasu memiliki kebiasaan tidak tertulis yang dianggap sxebagai standard.
4. **Budaya *(cultures)***

Hal ini meliputi norma social, adat dan kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat, yaitu standard moral dan estetika yang digunakan oleh masyarakat. Dari nilai-nilai tersebut berkembanglah aturan main tertentu yang berlaku dalam organisasi-organisasi pemerintah maupun swasta.

1. **Mekanisme Sosial *(power relations)***

Mekanisme sosial meliputi faktor-faktor penentu baik horizontal maupun vertikal umumnya bersifat hirarkis. Relasi social dalam masyarakat berlangsung berdasarkan beberapa factor penentu tersebut antara lain, umur, gender, kasta dan strata social. Bentuk relasi ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat, batasan tentang umur misalnya, kapan seseorang layak untuk memimpin dan berapa luas tanggung jawabnya. Hubungan kekuasaan ini juga dipengaruhi oleh sejauhmana demokratisasi dalam system pemerintahan, bagaimana keadilan dan kesetaraan menjadi nilai yang berkembang dalam masyarakat.

**MENGAPA KEBIJAKAN PUBLIK PENTING…?**

Persoalan penting yang sering dihadapi masyarakat miskin adalah, proses yang melingkupi kehidupannya, membatasia mereka untuk maju. Proses sangat mempengaruhi penghidupan masyarakat. Dalam hal ini terdapat sejumlah pengaruh penting dari proses dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1. Menarik dan merangsang orang untuk memilih strategi penghidupan tertentu, lokasi besarnya investasi dan bagaimana mengelola sumberdaya dengan efektif.
2. Menentukan akses, member atau menolak terhadap sumberdaya.
3. Memungkinkan orang untuk saling menukar sumberdaya yang dimiliki melalui mekanisme pasar.
4. Mempengaruhi hubungan antar pribadi dan kelompok, bagaimana suatu kelompok memperlakukan yang lain.

**TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN PUBLIK**

**Menjaring Isu**

 **Agenda**

**Perumusan Masalah**

**Implementasi**

**Evaluasi**

**BAGAIMANA MEMBANGUN KEBIJAKAN**

Kebijakan sangat besar pengaruhnya bagi penghidupan, oleh sebab itu perlu dicari upaya untuk mendorong perubahan kebijakan dan hukum yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam konteks ini terdapat beberapa upaya yang umum dilakukan yaitu:

1. Penyediaan informasi untuk mendukung kebijakan dan praktek pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Pendalaman dan penguatan hubungan antara kelompok masyarakat miskin dengan kelompok elit pembuat kebijakan.
2. Mendukung proses partisipatif dalam perumusan di semua tingkatan. Meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dari pengambil keputusan publik (salah satu tujuan penting desentralisasi ;memisahkan fungsi penyediaan pelayanan, fungsi pengaturan dan fungsi pendanaan).
3. Membantu perencanaan, penyusunan peraturan dan pelaksanaan perundang-undangan yang penting bagi masyarakat miskin. Mendorong penerapan kebijakan re-distribusi dan menyediakan jaring pengaman sosial yang secara langsung menguntungkan kelompok masyarakat miskin.
4. Mengembangkan pasar yang adil dan kompetitif.
5. Menyediakan dukungan bagi organisasi setempat untuk menerapkan proses dan tata laksana yang berpihak kepada masyarakat miskin.
6. Meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan (mengurangi resiko, mengefektifkan regulasi dan memastikan proses yang adil dan lain-lain).

**BAGAIMANA PENGARUH KEBIJAKAN BAGI PENGHIDUPAN MASYARAKAT**

Kebijakan memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian penghidupan masyarakat, perasaan tidak terpinggirkan dan aspek kesejahteraan secara umum. Kebijakan akan senantiasa kita saksikan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari individu, keluarga, masyarakat hingga dunia internasional. Contoh kebijakan yang dapat mempengaruhi penghidupan masyarakat adalah:

1. Nilai perumahan dipengaruhi oleh keberadaan penyediaan air, listrik, pembuangan sampah dan pengaturan pemerintahan terfhadap penyediaan jasa-jasa tersebut. Nilai perumahan pada suatu lokasi juga mungkin dipengaruhi oleh kepercayaan, budaya atau adat.
2. Nilai lahan dipengaruhi oleh kebijakan dan hukum di bidang pertanian, lingkungan hidup, eksport-import, pemasaran dan lain-lain.

|  |
| --- |
| **PRAKTIK ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK** |
| **Menagih Janji Pemerintah**Setelah melihat gambar dan tayangan tersebut, diskusikan dan lakukan praktek analisa bersama kelompok anda.Pilih salah satu contoh kasus; program atau kebijakan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten/Kota yang tengah atau sudah dilaksanakan sesuai dengan kasus yang disajikan.Analisa dan diskusikan serta jelaskan bagaimana perannan kebijakan publik khususnya pemerintah bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan, meningkatnya penghidupan masyarakat.  |

**Bagian II**

**MENGANALISA KEBIJAKAN PUBLIK**

**Apa Tujuan Analisa dilakukan…?**

Kebijakan memiliki pengaruh yang luas bagi penghidupan masyarakat, oleh karena itu penting untyk memahami hubungan dan keterkaitan antara kebijakan, individu dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini, institusi pemerintah dapat dijadikan sebagai konteks analisa, yang mana dari sinilah bermula berbagai praktek pembangunan yang dilakukan pemerintah, kebijakan, aturan, peran dan fungsi organisai-organisasi yang lain baik pemerintah maupun non pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat.

Dalam hal ini terdapat beberapa pokok analisa yang dapat dikembangkan lebih jauh yaitu:

1. **Peran.** Siapa saja atau institusi mana saja dan apa peran nyata yang mereka laksanakan bagi masyarakat.
2. **Tanggungjawab.** Apa saja ruang lingkup tanggung jawan instansi-instansi tersebut, sejauhmana tanggung jawab dilaksanakan, apakah tanggung jawab tersebut tercermin dalam kebijakan atau peraturan yang mereka buat.
3. **Hak.** Seberapa jauh instansi dan kelompok-kelompok yang ada memahami hak-hak dasar masyarakat, bagaimana hak-hak tersebut dipenuhi, dsb.
4. **Hubungan.** Bagaimana hubungan antar instansi dan kelompok yang ada, antara legislatif dan eksekutif dan sebagainya.

**Menganalisa Proses Kebijakan**

Suatu kebijakan dapat memiliki pengaruh yangluas bagi kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk memahami bagaimana suatu proses, termasuk kebijakan mempengaruhi penghidupan masyarakat perlu ditelusuri lebih jauh, tidak saja dampak yang terfjadi akan tetapi termasuk bentuk dan sifat kebijakan itu sendiri.

Bagaimana suatu analisa proses dilaksanakan dapat mengacu kepada berbagai metode analisa kebijakan yang telah ada, atau dapat pula dikembangkan metode yang lebih sederhana agar memungkinkan masyarakat luas turut serta di dalamnya.

Analisa kebijakan; peraturan dan perundang-undangan yang berlaku membutuhkan informasi dan telaah terfhadap beberapa hal berikut:

1. Apa yang dimuat dan diamanatkan dalam dokumen tertulis ?.
2. Apa yang diharapkan oleh suatu kebijakan dan peraturan-peraturan pendukung yang berkaitan ?.
3. Bagaimana kenyataannya dalam praktek ?.

Untuk memahami ketiga pertanyaan diatas petrlu dikembangkan metodologi yang efektif dan disesuaikan dengan kepentingan serta ruang lingkup penggunaannya. Pendekatan penghidupan berkelanjutan menekankan pentingnya setiap tahapan analisa secara partisipatif. Hal ini berarti membutuhkan panduan lebih lanjut untuk beberapa kelompok p[elaku analisa. Dalam hal ini kegiatan analisa lebih diarahkan untuk memahami pengaruh kebijakan terhadap kehidupan manusia, sebagai pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

**Metode dan alat kaji yang dapat digunakan.**

Memilih metode dan alat kaji yang sesuai untuk mengukur proses kebijakan sangatlah penting. Alat kaji yang digunakan dapat disesuaikan dengan ruang lingkup atau informasi yang hendak dikaji. Terdapat beberapa kelompok informasi yang penting untuk digali dalam hal ini antara lain:

1. Relasi social; gender, budaya, sejarah, keyakinan, dan aspek-aspek soaial lainnya yang memiliki pengaruh terhadap penghidupan berbagai kelompok masyarakat.
2. Ormas; proses pengambilan kebijakan, norma social, kepemimpinan, wewenang dan lain-lain.
3. Penyelenggaraan pemerintahan; kualitas system pemerintahan, struktur, kekuatan, efektivitas dan efisiensi, wewenang dan representasi.
4. Tingkat pelayanan; efektivitas dan responsifitas organisasi pemerintah dan swasta, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan lain-lain.
5. Kebijakan dan proses penyusunan kebijakan; kebijakan apa saja yang memiliki pengaruh langsung terfhadap penghidupan masyarakat, bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut diambil, oleh siapa dan kelompok mana saja yang memiliki pengaruh penting terhadap kelompok lain dan lain-lain.

Secara umum terdapat beberapa kebutuhan analisa kebijakan yang masing-masing menentukan metode dan alat kaji yang dapat digunakan yaitu:

1. Memahami konteks persoalan dan prioritas.
2. Mengukur performa organisasi.
3. Mengukur proses dan relasi social.
4. Menganalisa kebijakan.

**MODUL**

**MEMAHAMI DAN MENGANALISA KEBIJAKAN PUBLIK**

**(Praktik Analisis Kebijakan Publik)**

**Dosen Pengasuh:**

**Drs. Indra Muda, MAP**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**T.A. 2015/2016**